



**EVALUASI KINERJA ANGGARAN BELANJA DAERAH MELALUI  
PENDEKATAN VALUE FOR MONEY: STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH  
KOTA DAN KABUPATEN BIMA 2024**

*Hariatih<sup>1\*</sup>, Syarif Ahmad<sup>2</sup>, Suriani<sup>3</sup>*

*<sup>1</sup>ITB Nobel Makassar*

*<sup>2</sup>Universitas Mbojo Bima*

*<sup>3</sup>STIE Tri Darma*

*Email Koresponden: [hariatih@nobel.ac.id](mailto:hariatih@nobel.ac.id).<sup>1\*)</sup> [syarifahmad1975@gmail.com](mailto:syarifahmad1975@gmail.com)<sup>2</sup>, [surianis43@yahoo.com](mailto:surianis43@yahoo.com)<sup>3</sup>*

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstrak</b>
<b>Kata Kunci:</b> Value for Money, ekonomi, efisiensi, efektivitas, APBD	Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja anggaran Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima melalui pendekatan Value for Money yang menekankan tiga indikator utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua daerah telah melaksanakan anggaran secara ekonomis, ditandai dengan realisasi belanja di bawah pagu anggaran, meskipun Kabupaten Bima masih menghadapi hidden inefficiency pada belanja modal akibat rendahnya serapan dan keterlambatan pengadaan. Pada aspek efisiensi, Kota dan Kabupaten Bima berada pada kategori efisien, tetapi efisiensi Kabupaten Bima lebih bersifat administratif sehingga belum sepenuhnya mencerminkan efisiensi substantif dalam menghasilkan output pembangunan. Sementara itu, rasio efektivitas pendapatan menunjukkan bahwa Kota Bima memiliki kinerja lebih unggul dengan realisasi PAD dan beberapa komponen pendapatan yang melampaui target, sedangkan Kabupaten Bima masih menghadapi ketergantungan tinggi pada transfer pusat serta rendahnya capaian beberapa jenis pendapatan strategis. Temuan ini mengindikasikan bahwa integrasi konsep Value for Money, prinsip New Public Management, dan teori akuntabilitas publik sangat diperlukan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah serta meningkatkan kualitas belanja dan kemandirian fiskal kedua daerah di masa mendatang.
<b>Info Article</b>	<b>Abstract</b>
<b>Keywords:</b> Value for Money, economy, efficiency, effectiveness, regional budget (APBD)	<i>This study aims to evaluate the budget performance of Bima City and Bima Regency governments using the Value for Money approach, which emphasizes three key indicators: economy, efficiency, and effectiveness. The study employs a descriptive quantitative method utilizing secondary data sourced from the 2024 Budget Realization Reports (LRA). The analysis reveals that both regions executed their budgets economically—evidenced by actual spending remaining below the allocated ceilings—although Bima Regency still faces "hidden inefficiency" in capital expenditure due to low budget absorption and procurement delays. Regarding efficiency, both Bima City and Bima Regency fall into the "efficient" category; however, Bima Regency's efficiency is primarily administrative in nature and does not yet fully reflect substantive efficiency in generating development outputs. Meanwhile, the revenue effectiveness ratio indicates superior performance by Bima City, with Locally-Generated Revenue (PAD) and several revenue components</i>

---

*exceeding targets, whereas Bima Regency remains heavily dependent on central government transfers and struggles with low achievement levels in certain strategic revenue streams. These findings suggest that integrating the Value for Money concept, New Public Management principles, and public accountability theory is essential to strengthening regional financial governance and enhancing both the quality of expenditure and fiscal self-reliance for both regions in the future.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Penguatan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah menuntut adanya transparansi, partisipasi publik, serta pengawasan yang memadai terhadap proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Menurut Bastian (2016), keterlibatan masyarakat dan lembaga pengawas independen membantu memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan prioritas daerah, bukan sekadar kepentingan birokratis. Selain itu, penggunaan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan e-budgeting mempercepat arus informasi serta meminimalkan potensi manipulasi anggaran. Dengan demikian, tata kelola anggaran menjadi lebih terbuka, akuntabel, dan dapat diawasi secara real time (Setyawan & Susanto, 2021).

Lebih lanjut, prinsip value for money dalam belanja daerah tidak hanya menilai seberapa jauh anggaran dapat menghemat biaya, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Efektivitas belanja sangat dipengaruhi oleh sinkronisasi antara dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD, dengan implementasinya di tingkat perangkat daerah. Penelitian oleh Halim dan Abdullah (2020) menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan evaluasi kinerja berbasis indikator output–outcome cenderung memiliki kualitas belanja publik yang lebih baik, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ini menegaskan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) merupakan kunci untuk mencapai belanja daerah yang bernilai tambah (value creating expenditure).

Dalam konteks Indonesia, berbagai laporan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaannya. Banyak daerah yang menghadapi masalah seperti belanja modal rendah, dominasi belanja pegawai, serta ketidaksesuaian antara program prioritas dan realisasi anggaran. Studi oleh Rahmadana et al. (2022) mengungkap bahwa rendahnya kualitas belanja publik di beberapa daerah disebabkan oleh lemahnya integrasi antara dokumen perencanaan dan evaluasi berbasis kinerja, sehingga prinsip value for money belum sepenuhnya tercapai.

Fenomena yang lebih spesifik terlihat pada perangkat daerah yang memiliki serapan anggaran rendah di pertengahan tahun namun melakukan percepatan belanja pada triwulan akhir (year-end rush). Pola ini sering menyebabkan inefisiensi, rendahnya kualitas pekerjaan fisik, serta munculnya risiko penyimpangan pelaksanaan anggaran. Penelitian oleh Nuraini & Darwanis (2021) pada pemerintah daerah di Aceh menunjukkan bahwa percepatan belanja di akhir tahun menurunkan kualitas output dan outcome program pembangunan, karena proses pengadaan dan implementasi dilakukan terburu-buru. Fenomena ini memperlihatkan bahwa penerapan evaluasi kinerja secara konsisten menjadi faktor krusial untuk memastikan belanja daerah lebih efektif dan tepat sasaran

Pola serapan anggaran di Kota dan Kabupaten Bima menunjukkan kecenderungan late spending, yaitu realisasi belanja yang menumpuk pada akhir tahun anggaran. Fenomena ini umum terjadi pada beberapa daerah di NTB, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Keuangan (2023) yang mencatat bahwa rendahnya kualitas perencanaan, keterlambatan proses pengadaan, dan koordinasi lintas perangkat daerah menjadi faktor utama lambatnya realisasi

anggaran. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya kualitas belanja modal dan pencapaian outcome pembangunan. Penelitian oleh Sari & Herlina (2021) juga menegaskan bahwa keterlambatan penyerapan anggaran di daerah berdampak pada rendahnya efektivitas program pembangunan, terutama sektor kesehatan dan infrastruktur

Selain itu, tantangan dalam pengelolaan APBD Bima juga terlihat dari struktur belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja operasional, khususnya belanja pegawai. Berdasarkan laporan *Regional Fiscal Policy Review* (DJP, 2022), komposisi belanja modal di Kota dan Kabupaten Bima masih berada di bawah angka ideal 30%, yang menyebabkan ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur menjadi terbatas. Hal ini diperkuat oleh studi Hasanah et al. (2020) yang menemukan bahwa dominasi belanja pegawai berdampak pada rendahnya fleksibilitas fiskal pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan pembangunan jangka panjang. Kondisi ini menuntut reformasi perencanaan anggaran berbasis kinerja agar prinsip *value for money* dapat tercapai secara optimal.

Di sisi lain, Kota dan Kabupaten Bima memiliki potensi besar dalam pertanian, UMKM, dan pariwisata berbasis budaya. Namun, pemanfaatan APBD untuk pengembangan sektor unggulan ini belum sepenuhnya maksimal. Studi terbaru oleh Susanto & Darmawati (2022) menunjukkan bahwa daerah yang memiliki strategi belanja daerah yang berpihak pada sektor produktif akan mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam konteks Bima, kebijakan fiskal yang lebih terfokus pada penguatan infrastruktur pendukung pertanian, pengembangan UMKM, dan digitalisasi layanan publik sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah. Upaya ini juga sejalan dengan rekomendasi BPK RI bahwa perbaikan pengendalian intern dan optimalisasi belanja modal harus menjadi prioritas pemerintah daerah di NTB untuk meningkatkan kualitas pembangunan

Fenomena ketidakefisienan pengelolaan anggaran di berbagai daerah, termasuk Bima, dapat dijelaskan melalui Teori Value for Money (VfM) yang menekankan pentingnya pencapaian *ekonomi*, *efisiensi*, dan *efektivitas* dalam setiap proses penggunaan anggaran publik. Dalam konteks ini, ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa prinsip efisiensi yakni kemampuan menghasilkan output tertentu dengan input minimal belum tercapai secara optimal. Beberapa penelitian daerah lain menunjukkan pola serupa, sehingga menegaskan bahwa problem efisiensi bersifat struktural dan bukan kasus terisolasi. Dengan demikian, penerapan evaluasi berbasis output–outcome menjadi semakin penting untuk mengatasi ketimpangan antara rencana dan pelaksanaan program daerah.

Selain teori VfM, fenomena ini juga sesuai dengan kerangka New Public Management (NPM) yang menekankan modernisasi sektor publik melalui pendekatan manajerial, desentralisasi, dan pengukuran kinerja yang lebih akurat. NPM menjelaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan sistem tata kelola yang responsif, berorientasi hasil, dan efisien. Namun, penelitian Saraswati & Nurhadi (2023) serta Rahmawati (2023) menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip NPM—misalnya rendahnya inovasi pengadaan, lemahnya monitoring kinerja, serta ketergantungan pada proses manual. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya efisiensi belanja, terutama pada belanja modal dan belanja barang/jasa yang memerlukan kualitas manajemen yang lebih baik.

Selanjutnya, persoalan efisiensi anggaran juga dapat dilihat melalui perspektif **Teori Akuntabilitas Publik**, yang menekankan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya kepada masyarakat. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mencapai target realisasi anggaran menunjukkan adanya jarak antara kewajiban akuntabilitas dan praktik nyata di lapangan. Temuan Zulkifli (2023) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menegaskan bahwa lemahnya pengawasan internal dan kurangnya analisis kebutuhan yang tepat menjadi penyebab utama ketidakefisienan. Fenomena serupa di Bima menunjukkan bahwa akuntabilitas publik perlu diperkuat melalui transparansi,

sistem informasi keuangan yang lebih baik, serta evaluasi program secara berkala, agar efisiensi tidak hanya menjadi konsep normatif tetapi terimplementasi secara konsisten. Kendati demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih berfokus pada pengukuran rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas secara kuantitatif tanpa mengungkap akar permasalahan yang menyebabkan ketidakefisienan. Aspek tata kelola—seperti kapasitas birokrasi, kualitas perencanaan anggaran, pengendalian intern, mekanisme pengadaan, serta kepatuhan terhadap regulasi—masih belum menjadi bagian integral dari analisis efisiensi. Padahal, berbagai literatur tata kelola sektor publik menegaskan bahwa kualitas proses manajerial dan kelembagaan sangat menentukan tingkat efisiensi belanja daerah (Wiryono et al., 2022; Djahmuri, 2021).

Selain itu, terdapat kesenjangan teoretis yang signifikan dalam penelitian sebelumnya. Sebagian besar studi hanya memanfaatkan kerangka *Value for Money* tanpa mengintegrasikannya dengan teori lain yang relevan, seperti *New Public Management (NPM)* yang menekankan orientasi hasil, inovasi, dan modernisasi birokrasi, serta *Public Accountability Theory* yang menekankan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban publik. Padahal, ketiga teori tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana efisiensi anggaran dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, dinamika manajerial, dan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Minimnya integrasi teori ini membuat pemahaman mengenai efisiensi anggaran menjadi parsial dan kurang mendalam. Di sisi lain, penelitian terdahulu juga belum banyak mengkaji hubungan antara efisiensi belanja daerah dan dampaknya terhadap kualitas layanan publik maupun pencapaian outcome pembangunan. Fluktuasi efisiensi yang ditemukan di berbagai daerah masih kurang dikaitkan dengan implikasi jangka panjang terhadap sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian yang luas untuk mengkaji efisiensi APBD dari perspektif yang lebih holistik, dengan memasukkan dimensi governance, teori manajemen publik modern, serta implikasi terhadap kualitas pelayanan publik.

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis apakah anggaran belanja daerah Kota dan Kabupaten Bima telah dikelola secara ekonomis, ditinjau dari kesesuaian antara realisasi belanja dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
2. Untuk menilai apakah anggaran belanja daerah Kota dan Kabupaten Bima telah dikelola secara efisien, ditunjukkan dengan perbandingan yang optimal antara input anggaran dengan output kegiatan pembangunan.
3. Untuk mengevaluasi apakah anggaran belanja daerah Kota dan Kabupaten Bima telah dikelola secara efektif, ditunjukkan dengan pencapaian outcome pembangunan sesuai target yang direncanakan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis kinerja anggaran belanja daerah pada Pemerintah Kota Bima dan Pemerintah Kabupaten Bima berdasarkan konsep *Value for Money*. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, dan dokumen pendukung lainnya selama periode 2020–2023. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria laporan keuangan telah dipublikasikan, diaudit oleh BPK RI, dan tersedia secara lengkap. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasil analisis disajikan secara deskriptif dalam bentuk tabel dan grafik untuk

mempbandingkan kinerja anggaran antar tahun serta antara Pemerintah Kota Bima dan Pemerintah Kabupaten Bima.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis terhadap kinerja anggaran Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima Tahun 2024 menunjukkan tiga temuan utama: (1) belanja daerah dilaksanakan secara ekonomis, (2) pemanfaatan anggaran tergolong efisien, dan (3) kinerja pendapatan berada pada tingkat efektif. Hasil tersebut dianalisis menggunakan kerangka Value for Money, yang mencakup rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. data keuangan yang digunakan adalah anggaran dan realisasi APBD Tahun 2024 yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2024.

#### 3.1.1. Rasio Ekonomi

**Tabel 3.11**  
**Rasio Ekonomi Kota Bima**

Komponen	Rasio (%)	Kategori
Belanja Operasi	97,37	Ekonomis
Belanja Pegawai	98,80	Ekonomis
Belanja Barang/Jasa	94,98	Ekonomis
Belanja Modal	90,60	Sangat Ekonomis
<b>Total Belanja</b>	<b>96,24</b>	Ekonomis

*Sumber data diolah 2026*

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh komponen belanja berada pada kategori ekonomis, dengan rasio berada dibawah 100% total belanja daerah mencatat rasio sebesar 96,24% yang berarti ralisasi belanja lebih rendah dari pada anggaran, sehingga pemerintah mampu menekan pengeluaran ,rasio ekonomi menggambarkan tingkat penghematan pemerintah dalam menggunakan anggaran

Belanja operasi memiliki rasio ekonomi 97,37% disusul belanja pegawai 98,80% belanja barang jasa 94,98% dan belanja modal 90,60%, nilai-nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dapat dilaksanakan dengan penghematan walaupun rendahnya realisasi belanja modal mengidentifikasi adanya program pembangunan yang belum terealisasi optimal

**Tabel 3.11**  
**Rasio Ekonomi Kabupaten Bima**

Komponen Belanja	Rasio Ekonomi	Kategori
Belanja Operasi	95,06%	Ekonomis
Belanja Pegawai	96,85%	Ekonomis
Belanja Barang/Jasa	95,66%	Ekonomis
Belanja Hibah	96,94%	Ekonomis
Belanja Bansos	100%	Sesuai Anggaran
Belanja Modal Total	95,70%	Ekonomis
Belanja Modal – Tanah	92,01%	Ekonomis
Belanja Modal – Peralatan/Mesin	96,21%	Ekonomis
Belanja Modal – Gedung/Bangunan	95,32%	Ekonomis
Belanja Modal – Jalan Jaringan	100%	Sesuai Anggaran
Belanja Modal – Aset Lainnya	59,92%	Sangat Ekonomis (serapan rendah)
Belanja Tidak Terduga	50,64%	Ekonomis / serapan rendah
<b>Total Belanja &amp; Transfer</b>	<b>95,34%</b>	Ekonomis

*Sumber data diolah 2026*

Rasio ekonomi Kabupaten Bima menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berada pada kategori ekonomis dengan realisasi total sebesar 95,34%, ditandai oleh penghematan pada sebagian besar komponen belanja seperti belanja pegawai (96,85%) dan belanja barang/jasa (95,66%). Meskipun belanja modal juga tercatat ekonomis (95,70%), beberapa subkomponen terutama aset lainnya yang hanya terealisasi 59,92% mengindikasikan adanya keterlambatan pengadaan atau ketidaksiapan teknis sehingga penghematan tidak sepenuhnya mencerminkan efisiensi yang sehat. Dengan demikian, meskipun rasio ekonomi tampak baik secara angka, hasil ini menunjukkan perlunya perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan agar efisiensi anggaran benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi pembangunan daerah.

### 3.2.1. Rasio Efisiensi

**Tabel 3.2.1**  
**Rasio Efisiensi**

Komponen	Rasio (%)	Kategori
Belanja Operasi	97,37	Efisien
Belanja Barang/Jasa	94,98	Efisien
Belanja Modal	90,60	Efisien
Total Belanja	96,24	Efisien

*Sumber data diolah 2026*

Dari tabel diatas nilai efisiensi juga menunjukkan kinerja yang baik. Rasio efisiensi total belanja tercatat 96,24%, menandakan bahwa penggunaan anggaran telah mampu menghasilkan output yang sepadan dengan input yang dikeluarkan. Seluruh komponen belanja operasi, pegawai, barang/jasa, dan modal berada dalam kategori efisien, dengan nilai berkisar antara 90% hingga 98%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah dilakukan secara optimal tanpa pemborosan yang berarti. Meskipun demikian, efisiensi yang tinggi pada belanja modal perlu dianalisis lebih lanjut, apakah disebabkan oleh optimalnya pelaksanaan atau justru rendahnya realisasi kegiatan fisik yang dapat menurunkan kualitas pembangunan.

**Tabel 3.2.2**  
**Rasio Efisiensi Kabupaten Bima**

Komponen Belanja	Rasio Efisiensi	Kategori
Belanja Operasi	95,06%	Efisien
Belanja Pegawai	96,85%	Efisien
Belanja Barang/Jasa	95,66%	Efisien
Belanja Hibah	96,94%	Efisien
Belanja Bansos	100%	Sangat Efisien

*Sumber data diolah 2026*

Berdasarkan tabel rasio efisiensi, Pemerintah Kabupaten Bima menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang tergolong efisien pada hampir seluruh komponen belanja. Belanja operasi mencapai rasio efisiensi 95,06%, diikuti belanja pegawai (96,85%) dan belanja barang/jasa (95,66%), yang menandakan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan dengan penggunaan anggaran yang proporsional terhadap output yang dihasilkan. Belanja hibah (96,94%) dan belanja modal (95,70%) juga berada pada kategori efisien, mencerminkan

kemampuan pemerintah dalam menjaga produktivitas anggaran meskipun terdapat beberapa hambatan teknis pada kegiatan fisik. Sementara itu, belanja bantuan sosial terealisasi sepenuhnya (100%) sehingga dikategorikan sangat efisien karena penyalurannya tepat sesuai target anggaran. Berbeda dengan komponen lainnya, belanja tidak terduga hanya mencapai 50,64%, namun realisasi rendah ini bersifat wajar karena penggunaannya terbatas pada situasi darurat dan kebutuhan kontinjensi. Secara keseluruhan, tabel tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bima mampu menjaga tingkat efisiensi anggaran pada tingkat yang baik, meskipun efisiensi administratif ini tetap perlu dikawal dengan peningkatan kualitas output dan outcome pembangunan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

### 3.3.1. Rasio Efektivitas Pendapatan

**Tabel 3.1.3**  
**Rasio Efektivitas Pendapatan**

Komponen Pendapatan	Rasio (%)	Kategori
PAD	99,46	Efektif
Pajak Daerah	89,92	Tidak Efektif
Retribusi Daerah	103,91	Sangat Efektif
Hasil Kekayaan Dipisahkan	158,30	Sangat Efektif
Lain-lain PAD Sah	99,96	Efektif
Transfer Pusat	98,93	Efektif
Transfer Antar Daerah	95,46	Efektif
Total Pendapatan	98,70	Efektif

*Sumber data diolah 2026*

Pemerintah Kota Bima menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rasio efektivitas total mencapai 98,70%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah terealisasi hampir sepenuhnya sesuai target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan capaian 99,46%, sedangkan retribusi daerah bahkan melampaui target dengan nilai 103,91%. Komponen pendapatan lain seperti hasil kekayaan daerah yang dipisahkan juga mengalami peningkatan signifikan dengan rasio 158,30%. Transfer pusat dan antar daerah turut tercapai secara efektif dengan nilai masing-masing 98,93% dan 95,46%. Namun demikian, terdapat satu komponen yang masih kurang optimal yaitu pajak daerah, yang hanya mencapai 89,92%, sehingga masuk kategori tidak efektif. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk memperbaiki strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

**Tabel 3.3.2**  
**Efektivitas Pendapatan**

Komponen Pendapatan 2024	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kategori
Dana Perimbangan (Transfer Pusat)	695.594.381.312	632.975.550.859	91,00%	Efektif
Insentif Fiskal	2.793.929.000	0	0%	Tidak Efektif
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	8.469.439.308	7.875.547.294	92,99%	Efektif
Pendapatan Bagi Hasil BBNKB	8.655.253.560	7.152.234.289	82,61%	Cukup Efektif
Pendapatan Bagi Hasil Pajak BBM KB	22.681.549.478	20.631.215.848	91,98%	Efektif
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	38.815.791	40.784.440	105,08%	Sangat Efektif
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	21.970.802.824	19.520.559.101	88,85%	Tidak Efektif
Total Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil)	62.187.062.663	59.365.617.238	95,46%	Efektif

--	--	--	--	--

Sumber data Diolah 2026

Dari tabel diatas untuk Efektivitas pendapatan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2024 menunjukkan kinerja yang cukup baik, terutama pada komponen pendapatan transfer yang secara keseluruhan mencapai kategori efektif, dengan Pendapatan Bagi Hasil terealisasi sebesar 95,46% dari target. Beberapa subkomponen mencatat capaian tinggi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (92,99%) dan Pajak BBM KB (91,98%), bahkan Pendapatan Air Permukaan melampaui target hingga 105,08%, menunjukkan adanya optimalisasi pada sumber-sumber pendapatan tertentu. Namun, terdapat komponen yang masih kurang efektif, antara lain BBNKB yang hanya mencapai 82,61% dan Pajak Rokok 88,85%, serta Insentif Fiskal yang tidak terealisasi sama sekali (0%). Secara keseluruhan, efektivitas pendapatan 2024 mencerminkan kinerja penerimaan daerah yang solid meskipun peningkatan strategi intensifikasi pendapatan masih diperlukan untuk memperkuat stabilitas dan kemandirian fiskal Kabupaten Bima.

### 3.2. Pembahasan

#### 3.2.1. Efektivitas Kebijakan Anggaran dalam Perspektif Ekonomi

Rasio ekonomi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan pengeluaran agar tidak melampaui anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis, Kota Bima mencatat rasio ekonomi sebesar 96,24%, sedangkan Kabupaten Bima berada pada kisaran 95%, sehingga keduanya termasuk kategori ekonomis. Namun, kedalaman makna dari kondisi ini berbeda ketika ditinjau melalui perspektif teori dan penelitian empiris.

Secara teoretis, dalam kerangka Value for Money (VfM) ekonomi tidak hanya berarti realisasi belanja yang lebih kecil dari anggaran, tetapi menekankan pentingnya pemerolehan input dengan harga yang paling hemat tanpa mengorbankan mutu program. Pada Kota Bima, persentase ekonomi yang stabil pada hampir semua jenis belanja—termasuk belanja operasi dan belanja pegawai—menggambarkan adanya kemampuan pengendalian anggaran yang efektif sesuai konsep *optimal acquisition*. Hal ini menunjukkan keterpaduan antara perencanaan, penetapan prioritas, dan kontrol internal anggaran. Sebaliknya, pada Kabupaten Bima, meskipun rasio ekonomi berada di bawah 100%, rendahnya realisasi belanja modal menunjukkan fenomena *hidden inefficiency*, yaitu kondisi di mana penghematan tidak berasal dari efisiensi proses, tetapi dari ketidakterlaksanaan kegiatan, keterlambatan pengadaan, atau lemahnya kesiapan dokumen teknis. Hal ini menandakan bahwa ekonomi yang tampak pada angka sebenarnya belum mencerminkan ekonomi substantif dalam perspektif VfM.

Jika dikaitkan dengan New Public Management (NPM), teori ini menekankan pentingnya inovasi manajerial, reformasi birokrasi, serta orientasi hasil dalam pengelolaan sektor publik. Kota Bima mencerminkan prinsip ini dengan realisasi anggaran yang terkendali, sehingga setiap rupiah belanja lebih terarah pada pencapaian output. Kabupaten Bima, sebaliknya, menunjukkan bahwa beberapa komponen belanja—khususnya belanja modal—tidak dieksekusi secara optimal, mencerminkan belum efektifnya mekanisme manajemen proyek dan pengadaan, yang menurut NPM merupakan fondasi penting untuk menciptakan sistem anggaran yang efisien dan ekonomis.

Dalam perspektif Teori Akuntabilitas Publik, ekonomi anggaran mencerminkan nilai akuntabilitas pemerintah dalam memastikan pengeluaran daerah dilakukan secara hemat namun tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Kota Bima menunjukkan kesesuaian antara pengendalian belanja dan pertanggungjawaban publik, sementara Kabupaten Bima tampak belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi akuntabilitas, mengingat penghematan belanja modal justru berpotensi merugikan masyarakat karena tertundanya pembangunan fisik.

Temuan ini juga selaras dengan beberapa penelitian terdahulu. Nuraini & Darwanis (2021) menemukan bahwa rendahnya realisasi belanja modal di banyak pemerintah daerah disebabkan oleh ketidaksiapan perencanaan dan lemahnya pengadaan barang dan jasa, sehingga rasio ekonomi yang rendah bukan menunjukkan efisiensi, tetapi ketidakefektifan pelaksanaan program. Hasanah et al. (2020) juga menegaskan bahwa dominasi belanja operasional dan lemahnya perencanaan proyek publik dapat menghasilkan tingkat ekonomi semu. Sementara itu, Rahmadana et al. (2022) menunjukkan bahwa efisiensi dan ekonomi hanya bermakna ketika disertai keselarasan antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan, suatu kondisi yang lebih tampak pada Kota Bima dibanding Kabupaten Bima.

### **3.2.2. Efisiensi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah**

Rasio efisiensi digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menghasilkan output pelayanan publik dengan menggunakan input anggaran secara optimal. Efisiensi yang tinggi menunjukkan bahwa realisasi anggaran menghasilkan manfaat yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam konteks ini, Kota Bima mencatat rasio efisiensi sebesar 96,24%, sedangkan Kabupaten Bima berada pada kisaran 95%. Meskipun kedua daerah termasuk kategori efisien (karena berada pada interval 81–100%), analisis yang lebih mendalam memperlihatkan perbedaan kualitas efisiensi antara keduanya.

Dari perspektif Value for Money (VfM), efisiensi tidak hanya berarti realisasi anggaran mendekati anggaran yang ditetapkan, tetapi juga terkait dengan kemampuan pemerintah meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan keluaran dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Kota Bima menunjukkan pola efisiensi yang lebih stabil dan merata di seluruh komponen belanja, seperti belanja pegawai, barang/jasa, dan belanja modal, yang menunjukkan bahwa proses anggaran berjalan sesuai rencana dan output pelayanan dapat dicapai tanpa pemborosan. Hal ini menandakan bahwa efisiensi Kota Bima bukan hanya administratif, tetapi lebih dekat pada efisiensi substantif, yaitu efisiensi yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

Sebaliknya, Kabupaten Bima menunjukkan efisiensi administratif yang tinggi, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan efisiensi substantif. Beberapa komponen belanja, terutama belanja modal dan belanja tidak terduga, menunjukkan serapan rendah atau tidak merata, sehingga efisiensi angka tidak diikuti oleh efektivitas output. Fenomena ini disebut sebagai *pseudo-efficiency*, yaitu kondisi dimana rasio efisiensi tampak baik, tetapi pelaksanaan kegiatan belum optimal sehingga kualitas outcome pembangunan tidak meningkat secara signifikan. Dengan demikian, meskipun angka efisiensi Kabupaten Bima masuk kategori "efisien," secara substantif efisiensinya belum optimal.

Dalam perspektif New Public Management (NPM), efisiensi yang ideal membutuhkan inovasi manajerial, digitalisasi proses anggaran, percepatan pengadaan, serta koordinasi lintas perangkat daerah. Tingginya efisiensi Kota Bima menunjukkan penerapan prinsip NPM yang lebih baik, seperti proses pengadaan yang lebih tertib, sistem administrasi digital yang lebih mapan, dan pengelolaan belanja yang lebih terstruktur. Sementara itu, variasi efisiensi Kabupaten Bima menunjukkan bahwa prinsip NPM belum sepenuhnya diinternalisasi. Lemahnya kapasitas birokrasi, proses pengadaan yang lambat, serta kurangnya monitoring berbasis outcome menghambat kemampuan Kabupaten dalam mencapai efisiensi substantif.

Dalam Teori Akuntabilitas Publik, efisiensi juga mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan bahwa anggaran digunakan secara hemat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kota Bima menunjukkan tingkat akuntabilitas yang lebih baik karena efisiensi belanjanya menghasilkan output yang konsisten. Sementara itu, Kabupaten Bima menunjukkan kesenjangan antara efisiensi administratif dan akuntabilitas substantif, karena beberapa belanja tidak menghasilkan outcome yang sepadan.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu. Saraswati & Nurhadi (2023) menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah di Indonesia mengalami pseudo-efficiency, yaitu efisiensi serapan tinggi tetapi kualitas output rendah—sebuah kondisi yang sangat mirip dengan Kabupaten Bima. Halim & Abdullah (2020) menegaskan bahwa efisiensi belanja sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan dan manajemen kinerja, dan daerah yang memiliki sistem perencanaan yang baik cenderung memiliki efisiensi yang lebih stabil, sebagaimana terlihat pada Kota Bima. Sementara itu, Zulkifli (2023) menemukan bahwa efisiensi yang rendah secara substantif sering disebabkan lemahnya pengawasan internal dan kapasitas birokrasi, fenomena yang juga terlihat pada pola pelaksanaan kegiatan Kabupaten Bima.

### 3.2.3. Efektivitas Pendapatan Daerah terhadap Kemandirian Fiskal

Rasio efektivitas pendapatan menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatan sesuai target anggaran. Dalam analisis ini, Kota Bima menunjukkan efektivitas pendapatan yang sangat tinggi yaitu 98,70%, sedangkan Kabupaten Bima memiliki efektivitas yang bervariasi antar komponen, dengan capaian terbaik pada transfer antar daerah (95,46%), namun beberapa komponen strategis seperti BBNKB (82,61%) dan pajak rokok (88,85%) belum mencapai tingkat efektif. Secara keseluruhan, efektivitas pendapatan Kota Bima jauh lebih kuat dibanding Kabupaten Bima.

Dari perspektif Value for Money (VfM), efektivitas merupakan pilar terpenting karena mengukur kemampuan pemerintah menghasilkan *outcome fiskal* yang sesuai tujuan. Kota Bima menunjukkan kemampuan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hampir mencapai target penuh (99,46%), bahkan beberapa komponen seperti retribusi (103,91%) dan hasil kekayaan daerah dipisahkan (158,30%) melampaui target. Kondisi ini mencerminkan efektivitas substantif, di mana realisasi pendapatan tidak hanya memenuhi target administratif tetapi juga menunjukkan kapasitas fiskal daerah yang semakin kuat.

Sebaliknya, efektivitas pendapatan Kabupaten Bima masih menunjukkan ketergantungan yang besar pada pendapatan transfer, dengan PAD yang tidak muncul secara dominan dan beberapa komponen dalam kondisi tidak efektif. Dalam pandangan VfM, efektivitas rendah pada sumber pendapatan lokal menandakan terbatasnya kemampuan daerah dalam menggerakkan ekonomi produktif dan memperluas basis penerimaan. Hal ini semakin diperjelas dengan tidak terealisasinya Insentif Fiskal (0%) yang seharusnya dapat diraih daerah ketika indikator tata kelola fiskalnya baik.

Jika dikaitkan dengan New Public Management (NPM), teori ini menekankan pentingnya inovasi, efisiensi administrasi, dan sistem manajemen modern dalam memperkuat pendapatan daerah. Kota Bima menunjukkan indikasi penerapan prinsip NPM melalui efektivitas PAD yang tinggi, yang menandakan adanya sistem pengelolaan pajak, retribusi, dan pendapatan lain yang lebih tertib, terstruktur, dan berbasis teknologi. Sebaliknya, Kabupaten Bima masih menghadapi persoalan klasik, seperti lemahnya database wajib pajak, rendahnya inovasi layanan perpajakan, dan minimnya modernisasi proses penagihan, sehingga beberapa pendapatannya tidak efektif. Ini menunjukkan bahwa prinsip NPM belum sepenuhnya terimplementasi, terutama dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.

Dalam konteks Teori Akuntabilitas Publik, efektivitas pendapatan merupakan cermin dari tanggung jawab pemerintah untuk menghimpun pendapatan secara optimal demi membiayai pelayanan publik. Kota Bima menunjukkan tingkat akuntabilitas yang lebih baik, terlihat dari pencapaian pendapatan yang hampir menyentuh target keseluruhan dan struktur PAD yang menguat. Sementara itu, Kabupaten Bima belum memperlihatkan tingkat akuntabilitas fiskal yang memadai karena pendapatan lokalnya belum berkembang dan pengelolaan pajak daerah masih kurang optimal.

Temuan ini diperkuat oleh sejumlah penelitian terdahulu. Gamayuni (2018) menegaskan bahwa efektivitas PAD berperan penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah; temuan ini konsisten dengan kondisi Kota Bima yang memiliki efektivitas PAD tinggi sehingga lebih mandiri secara fiskal dibanding Kabupaten Bima. Rahman & Sari (2020) menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas pajak daerah sering disebabkan kelemahan sistem pendataan wajib pajak serta kurangnya inovasi dalam pelayanan pajak, situasi yang identik dengan kondisi Kabupaten Bima. Selain itu, penelitian Susanto & Darmawati (2022) membuktikan bahwa digitalisasi sistem perpajakan daerah secara signifikan meningkatkan efektivitas PAD hal yang selaras dengan efektivitas Kota Bima yang relatif lebih tinggi dan stabil. Temuan lain dari Zulkifli (2023) menekankan bahwa rendahnya efektivitas pendapatan sering disebabkan lemahnya pengawasan dan kapasitas birokrasi, suatu fenomena yang tercermin pada ketidakefektifan beberapa komponen pendapatan Kabupaten Bima.

#### **3.2.4. Integrasi Value for Money dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah**

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bima telah menerapkan prinsip *Value for Money* (VfM) dalam pengelolaan keuangan daerah dengan kinerja yang tergolong memadai. Hal ini tercermin dari tingginya capaian dalam aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, yang mengindikasikan kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya publik secara bijak, menghasilkan keluaran yang sebanding dengan input anggaran, serta mencapai target pendapatan secara optimal. Ketiga elemen utama dalam konsep *value for money* yakni ekonomi (*economy*), efisiensi (*efficiency*), dan efektivitas (*effectiveness*) berfungsi sebagai kerangka dasar yang memungkinkan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran publik benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.

Ditinjau melalui kerangka Teori *Value for Money*, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bima telah berhasil mengelola berbagai tahapan pembangunan mulai dari input, proses, hingga outcome dengan tata kelola yang baik. Namun demikian, prinsip *Value for Money* menekankan bahwa pencapaian ekonomi, efisiensi, dan efektivitas bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses berkelanjutan yang harus terus dievaluasi dan disempurnakan. Meskipun rasio ekonomi dan efisiensi saat ini terbilang cukup memuaskan, evaluasi terhadap manfaat nyata dari output dan outcome yang dihasilkan tetap diperlukan agar pembangunan yang dirancang tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Lebih dalam lagi, hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan dalam konteks pendekatan *New Public Management* (NPM), yang menekankan pada pembaruan sistem pemerintahan melalui prinsip manajerial modern, inovasi kebijakan, pemanfaatan teknologi, serta penerapan mekanisme pasar dalam pelayanan publik. Tingkat efisiensi dan pengelolaan ekonomi yang tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Bima menunjukkan adanya adopsi prinsip-prinsip NPM, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Meskipun demikian, sejumlah aspek masih perlu ditingkatkan, seperti penerapan *performance-based budgeting*, digitalisasi layanan publik, dan inovasi dalam proses pengadaan. Perbaikan pada elemen-elemen ini akan membantu menciptakan sinergi yang lebih kuat antara penerapan *Value for Money* dan reformasi manajemen publik.

Dalam perspektif Teori Akuntabilitas Publik, temuan ini mencerminkan adanya pergeseran positif dalam tanggung jawab pemerintah kepada warga sebagai pemangku kepentingan utama. Akuntabilitas publik tidak hanya terbatas pada pelaporan anggaran semata, melainkan juga menyangkut komitmen terhadap keterbukaan informasi, transparansi proses, dan peningkatan mutu layanan publik. Efisiensi dalam belanja dan tingginya efektivitas pendapatan mengindikasikan bahwa pemerintah telah memenuhi prinsip *accountability for results*. Meski demikian, untuk memastikan bahwa program pembangunan berdampak nyata

dan dapat dipertanggungjawabkan, reformasi dalam tata kelola, khususnya terkait evaluasi dan pengukuran dampak program, masih sangat dibutuhkan.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh temuan-temuan sebelumnya. Wiryono et al. (2022) menyatakan bahwa integrasi prinsip *Value for Money* dalam pemerintahan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas belanja publik, terutama bila didukung oleh mekanisme pengawasan yang efektif dan kapasitas birokrasi yang memadai. Penelitian Djahhuri (2021) juga menegaskan bahwa pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam penganggaran sangat bergantung pada penguatan manajemen internal, termasuk strategi perencanaan yang matang dan modernisasi proses birokrasi. Sementara itu, Sari dan Herlina (2021) menemukan bahwa penguatan sistem pengendalian internal serta digitalisasi proses keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas implementasi anggaran secara signifikan.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip Value for Money di Pemerintah Kota Bima telah membentuk fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada prinsip *good governance* yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Untuk memperkuat integrasi prinsip tersebut ke depan, sejumlah langkah strategis perlu dilakukan, antara lain: peningkatan kualitas perencanaan anggaran melalui sinkronisasi antara RPJMD, Renstra OPD, KUA-PPAS, dan APBD dengan pendekatan yang lebih konkret dan terukur; penguatan sistem pengawasan internal melalui Inspektorat dan pemanfaatan teknologi informasi; percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui instrumen seperti e-budgeting, e-planning, dan e-reporting; serta optimalisasi proses monitoring dan evaluasi berbasis *outcome*, agar dampak pembangunan dapat dinilai secara substansial, tidak hanya berdasarkan serapan anggaran. Integrasi yang konsisten antara *Value for Money*, pendekatan NPM, dan prinsip akuntabilitas publik menjadi elemen strategis bagi Pemerintah Kota Bima dalam membangun pelayanan publik yang lebih responsif dan berkelanjutan di masa depan

#### IV. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Bima dan Pemerintah Kabupaten Bima disarankan untuk terus memperkuat penerapan prinsip *Value for Money* dalam pengelolaan APBD melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Meskipun kedua daerah telah menunjukkan kinerja yang ekonomis dan efisien, peningkatan kualitas belanja perlu menjadi prioritas agar efisiensi yang dicapai tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat pembangunan yang optimal bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bima perlu memprioritaskan perbaikan pada proses perencanaan dan pelaksanaan belanja modal, khususnya melalui percepatan proses pengadaan barang dan jasa, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi agar keterlambatan pelaksanaan program dapat diminimalkan. Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Bagi Pemerintah Kota Bima, kinerja yang telah dicapai perlu dipertahankan melalui penguatan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah, digitalisasi sistem penganggaran, serta penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) sehingga kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan memperluas periode pengamatan, menambah jumlah pemerintah daerah sebagai objek penelitian, serta mengombinasikan analisis kuantitatif dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi

faktor-faktor kelembagaan, tata kelola, dan kapasitas organisasi yang memengaruhi pencapaian ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Djamhuri, A. (2021). *Public sector budgeting and performance*. UB Press.
- Gamayuni, R. R. (2018). The effectiveness of local revenue and fiscal independence in Indonesian local governments. *Jurnal Keuangan Publik*, 12(2), 101–115.
- Glynn, J., & Perkins, D. (1997). *Value for money auditing in the public sector*. Routledge.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2020). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Hasanah, N., Darwanis, & Abdullah, S. (2020). Factors affecting the realization of capital expenditure. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 6(1), 45–58.
- Mahsun, M. (2019). *Pengukuran kinerja sektor publik*. BPFE-Yogyakarta.
- Rahman, A., & Sari, D. (2020). Digitalisasi pajak daerah dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(3), 233–244.
- Saraswati, R., & Nurhadi, A. (2023). Efisiensi belanja daerah dan kualitas output pembangunan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 18(1), 55–70.
- Sari, R., & Herlina, E. (2021). Pengaruh digitalisasi anggaran terhadap transparansi keuangan daerah. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 9(2), 120–132.
- Wiryono, S., Putra, I., & Lestari, D. (2022). Pengawasan internal dan peningkatan kualitas belanja publik. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 10(1), 88–102.
- Darwanis, & Nuraini. (2021). Evaluasi serapan anggaran dan kualitas output pembangunan daerah. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 15(2), 101–116.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). *Regional fiscal policy review*. Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Kajian kualitas belanja daerah 2023*. Kemenkeu RI.
- Zulkifli. (2023). Analisis efisiensi belanja dan akuntabilitas publik pada Dinas Pertanian dan Perkebunan. *Jurnal Administrasi Publik Daerah*, 7(1), 33–47.
- Bastian, I. (2016). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Erlangga.
- Hood, C. (1995). The "New Public Management" in the 1980s: Variations on a theme. *Accounting, Organizations and Society*, 20(2–3), 93–109.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik*. BPFE-Yogyakarta.
- Nuraini, D., & Darwanis. (2021). Evaluasi serapan anggaran dan kualitas output pembangunan daerah. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 15(2), 101–116.
- Rahmadana, M. F., Sari, D., & Akbar, A. (2022). Kualitas belanja daerah dan implementasi anggaran berbasis kinerja. *Jurnal Kebijakan Publik*, 17(3), 231–248.
- Rahman, A., & Sari, D. (2020). Digitalisasi pajak daerah dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(3), 233–244.
- Setyawan, D., & Susanto, H. (2021). Transparansi anggaran melalui SIPD dan e-budgeting dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*, 5(1), 15–28.
- Susanto, H., & Darmawati, D. (2022). Implementasi e-tax dan dampaknya terhadap peningkatan PAD. *Jurnal Pajak dan Keuangan Daerah*, 5(1), 1–15.